

ABSTRAK

Sebagai negara yang sedang menyelenggarakan pembangunan, Negara Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut. Salah satu cara meningkatkan pemasukan Negara salah satunya dapat melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan didaerah. Dalam proses pemungutannya sering kali wajib pajak melakukan pengakuan harga dalam membayar BPHTB. Pengakuan harga yang dimaksud yaitu wajib pajak tidak menghitung dengan dasar pengenaan yang seharusnya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan mengenai pengakuan harga pun seakan akan diabaikan begitu saja oleh wajib pajak. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan pembayaran BPHTB. Disarankan untuk wajib pajak agar melakukan pembayaran dengan sebenar-benarnya berdasarkan dengan aturan yang ada serta dapat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pajak BPHTB dalam pemasukan Negara.

Kata kunci: Pemungutan pajak; BPHTB; Pengakuan harga; Dasar pengenaan BPHTB

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia needs substantial funds to carry out the development. One way to increase state income is to collect taxes to the society. Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is one of the taxes collected by the Regional Government and used to carry out the regional development. In the collection process, taxpayers often do recognition of prices for paying BPHTB. The price recognition is that the taxpayer does not calculate the tax with the appropriate basis of imposition that stipulated in the Act. The problems that occur regarding price recognition also seem to be ignored by the taxpayer. The research method used in this thesis is normative juridical research, which is focused on analyzing a legal problem against the norms or rules of positive law that apply. The results of this study concluded that there were still violations committed by taxpayers on the implementation of BPHTB payments. It is recommended for taxpayers to make real payments based on existing rules and can be carried out socialization to the public regarding the importance of BPHTB tax in the state income.

Keywords : *Tax Collection; BPHTB; Revenue Recognition; Imposition of BPHTB*